



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

DAKWAAN GRATIFIKASI EKS KEPALA BEA CUKAI JOGJA MENGEMUKA NAMA PENGUSAHA IRWAN MUSSRY

**Government
(Hal.2)
Jokowi Sebut
Pansel KPK Rampung
pada Juni**

.....

Fakta-fakta mengejutkan terungkap dalam sidang dakwaan Mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta (Jogja,Red) Eko Darmanto menjalani sidang terkait dugaan gratifikasi. Eko didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar, tegas Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (14/5/2024). Duit datang dari belasan orang berbeda yang bersangkutan dengan keperluan jabatannya. Nama pengusaha Irwan Mussry yang merupakan suami penyanyi Maia Estianty mengemuka. Uang yang diberikan Irwan ke Eko mencapai Rp 100 jutaan. Tak hanya gratifikasi, Eko juga didakwa pasal pencucian uang. Dia menggunakan uang gratifikasi itu untuk dibelikan sejumlah aset dengan tujuan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi. Duh, diawali gara-gara pamer harta di sosial media nih!

Baca di hal 11....

.....

GRATIFIKASI YANG DITERIMA OLEH EKO SAAT MENJADI PEJABAT DI BEA CUKAI:

- Andry Wirjanto sebesar Rp 1.370.000.000,00
- Ong Andy Wiryanto sebesar Rp6.850.000.000,00
- David Ganianto dan Teguh Tjokrowibowo sebesar Rp 300.000.000,00
- Lutfi Thamrin dan M. Choiril sebesar Rp 200.000.000,00
- Irwan Daniel Mussry sebesar Rp 100.000.000,00
- Rendhie Okjiasmoko sebesar Rp 30.000.000,00
- Martinus Suparman sebesar Rp 930.000.000,00
- Soni Darma sebesar Rp 450.000.000,00
- Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno sebesar Rp 250.000.000,00
- Benny Wijaya sebesar Rp 60.000.000,00
- S. Steven Kurniawan sebesar Rp 2.300.229.000
- Lin Zhengwei dan Aldo sebesar Rp 204.380.000,00
- Dari pengusaha yang tidak diketahui namanya sebesar Rp 10.916.694.640.24.

Sumber: Jaksa KPK

.....

DIAWALI PAMER HARTA, EKO DARMANTO JADI TERSANGKA GRATIFIKASI

- **Viral Pamer Harta**
Nama Eko Darmanto mencuat ke publik dari cuitan akun Twitter @logikapolitikid yang menyebut pejabat eselon III bea cukai ini mempunyai koleksi mobil antik, motor gede Harley Davidson, dan beberapa barang branded. Kekayaan itu kerap dipertontonkan melalui akun media sosial.
- **Kekayaan Tidak Dilaporkan di LHKPN**
Berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2021, Eko memiliki kekayaan Rp15,7 miliar dengan utang Rp9 miliar, termasuk harta Rp12,5 miliar berupa dua tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara. Pada 1 Maret 2023, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa kepemilikan motor gede Eko tidak dilaporkan dalam LHKPN, sehingga Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan DJBC diperintahkan menyelidiki kecocokan harta dan utang Eko dengan laporan SPT pajak.
- **Dicopot dari jabatan**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat DJBC menyampaikan Eko resmi dibebastugaskan dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Pencopotan Eko dari jabatannya telah dilakukan mulai 2 Maret 2023 untuk memudahkan pemeriksaan oleh pihak berwajib.
- **Diperiksa KPK**
Pada 7 Maret 2023, Eko dan istrinya, Ari Murniyanti, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 8 jam untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya yang dianggap tidak wajar. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, istri Eko turut diperiksa karena dalam LHKPN terdapat sejumlah harta atas namanya. Eko mengaku dirinya di-framing atas kekayaan yang disebut tidak wajar.
- **Ditetapkan Tersangka**
Penyidik lembaga antirasuah menetapkan Eko sebagai tersangka pada 12 September 2023 setelah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU ke tahap penyidikan. Kasus ini terungkap usai Eko diketahui tidak melaporkan aset yang bernilai ekonomis ke dalam LHKPN.
- **KPK Periksa Saksi**
Pihak KPK mendalami aliran gratifikasi Eko dengan memeriksa saksi. Ali Fikri mengungkapkan, tim penyidik KPK telah memeriksa tiga saksi. Mereka meliputi Direktur PT Emerald Perdana Sakti Ayu Andhini, pihak swasta Yosep Krisnawan Adi, dan Ratna Aditya Enggitt Pramesty. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Pengusaha Irwan Mussry sebagai saksi dalam perkara rasuah Eko pada 20 September 2023.
- **Resmi Ditahan**
Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 8 Desember 2023 atas kasus gratifikasi dan TPPU, pihak penyidik resmi menahan Eko Darmanto. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima Eko berjumlah Rp18 miliar.

JOKOWI SEBUT PANSEL KPK RAMPUNG PADA JUNI

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa (14/5/2024). (Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dia baru menyiapkan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Ia akan mengumumkan komposisinya pada Juni.

"Iya (nantinya diumumkan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota-anggota dari pansel," kata Jokowi usai mengecek Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengatakan kriteria untuk anggota pansel adalah tokoh yang baik, punya integritas, dan punya perhatian terhadap pemberantasan korupsi. "Saya kira banyak sekali, tinggal nanti dipilih."

Presiden membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya, sesuai dengan undang-undang. Pansel bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Jokowi memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewas KPK melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK yang terbit pada 24 November 2023. Presiden juga menerbitkan Keppres Nomor 113/P tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewas KPK di hari yang sama.

Dengan dikeluarkannya dua Keppres tersebut, maka masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2024.

Dalam keterangan terpisah, Istana Kepresidenan mengatakan Pansel

Capim KPK akan ditetapkan oleh Jokowi melalui surat Keputusan Presiden. "Keanggotaan pansel tersebut akan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari unsur masyarakat," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Ari mengatakan, nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan anggota panitia yang kredibel dan berintegritas.

Rencana pembentukan pansel capim KPK mendapat perhatian kritis dari sejumlah pihak. Misalnya, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, mengatakan pembentukan Pansel KPK adalah ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Novel mengatakan ada pengalaman buruk dari panitia seleksi pada 2019.

Saat itu, kata dia, panitia seleksi justru menghasilkan pimpinan yang merusak KPK. "Ini ujian terakhir pemerintah, apakah ada keinginan untuk memberantas korupsi atau tidak," kata Novel.

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK.

Polisi-Jaksa Bisa Daftar

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan tak masalah jika penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) KPK.

"Siapa saja yang mau mendaftarkan diri, kalau kebetulan dia dari unsur Polri dan kejaksaan kan tak masalah, memang dibuka untuk

umum dengan syarat formil," kata Nawawi usai kuliah umum di Gedung Auditorium Harun Nasution, Kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan.

Menurut dia, para capim KPK yang penting harus memenuhi syarat formil seperti sudah berusia 50 tahun dan tak lebih dari 65 tahun dan kebetulan dari Polri atau Kejagung. "Yang tidak bisa kalau dari Polri atau kejaksaan artinya harus diluluskan," kata dia.

Mengenai loyalitas para capim KPK jika berasal dari Polri dan Kejagung, Nawawi mengatakan pentingnya anggota pansel bekerja dengan tepat untuk mencari Capim KPK. "Kami harapkan nanti bisa benar-benar mendapatkan sosok yang kompeten penuh integritas. Betul-betul punya keberanian untuk menghindarkan diri dari upaya intervensi mengganggu independensi KPK," kata Nawawi.

Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Presiden Jokowi tak lagi punya perspektif bahwa formasi pimpinan KPK harus memiliki orang-orang dari Kejagung dan Polri.

"Dibayangkan KPK itu selalu harus ada jaksanya, harus ada polisinya, itu keliru," kata dia dalam diskusi bersama Indonesia Corruption Watch, Minggu (12/5/2024).

Zainal justru mempertanyakan loyalitas para pihak yang telah disiapkan menjadi Capim KPK baik itu dari Kejagung maupun Polri.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengatakan kerap kali menemukan pegawai KPK yang berafiliasi dengan eksternal. Ia mengatakan, pernah menemukan penyidik KPK yang malah tunduk kepada Kapolri dan Jaksa Agung. (wid,rls,ist/dya)

APA TUGAS PANSEL KPK?

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Mengumumkan penerimaan calon Setelah terbentuk, dalam ayat 4 disebutkan panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon. Ayat 5 menjelaskannya bahwa pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 hari kerja secara terus menerus.

2. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon, sebagaimana disebutkan dalam ayat 6. Tanggapan disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.

3. Pada ayat 8, panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden. Waktunya paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.

- Setelah itu, Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR RI. Anggota dewan wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden. Setelah itu DPR RI wajib memilih dan menetapkan calon, yakni seorang Ketua dan 4 anggota lainnya sebagai Wakil Ketua.

- Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Presiden kemudian wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR RI.



Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah-DPR Diam-diam Restui Revisi UU MK

JAKARTA- Pembahasan revisi UU MK sudah lama menjadi sorotan karena terkesan dilakukan DPR dan pemerintah secara diam-diam. Terbaru, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) ternyata diterima Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.

Fakta mengejutkannya, persetujuan tersebut dilakukan pada saat DPR masih berada di masa reses yaitu Senin (13/5/2024). Padahal masa sidang selanjutnya baru dimulai pada Selasa (14/5/2024).

Menko Hadi Tjahjanto mewakili Pemerintah baru saja menerima hasil pembahasan RUU MK di tingkat Panitia Kerja (Panja) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, pada hari terakhir masa reses dewan.

"Atas nama Pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja yang menjadi dasar pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat I pada hari ini. Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU MK di Sidang Paripurna DPR RI," kata Hadi.

Menurut dia, ada berbagai poin yang penting dari perubahan atas UU MK yang telah dibahas bersama DPR RI tersebut. Bahkan, Hadi merasa, perubahan-perubahan tersebut akan semakin memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin meneguhkan peran MK sebagai penjaga konstitusi.

"Pemerintah berharap, kerja sama yang terjalin dengan baik antara DPR RI dan Pemerintah dapat terus berlangsung, untuk terus mengawal tegaknya negara kesatuan yang kita cintai bersama," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat kerja dengan Komisi III itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, dan Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Habiburokman.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan Pemerintah apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin.

Dalam rapat tersebut, Adies



Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk. I terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/5/2024). (Dok Humas Kemenko Polhukam)

mengatakan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan memutuskan bahwa pembahasan RUU tersebut dapat langsung dilanjutkan pada Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I melalui Rapat Kerja di Komisi III.

Selain itu, kata dia, panja juga telah melaporkan hasil pembahasannya dan fraksi-fraksi melalui perwakilannya telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi, serta menandatangani naskah RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Namun, menurut dia, pihak pemerintah belum memberikan pendapat akhir mini dan belum menandatangani naskah RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 163 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, mekanisme Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I, menurutnya yang belum dilaksanakan yaitu pendapat akhir mini Presiden dan penandatanganan naskah RUU oleh pihak pemerintah.

Soal rapat tersebut digelar di masa reses, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut dia telah mengecek ada izin pimpinan agar dilakukan rapat. "Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Dasco.

Jokowi Enggan Komentar

Terpisah, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari revisi Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang diam-diam kembali dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ditanya mengenai hal itu, Kepala Negara hanya merespons singkat dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada DPR.

"Tanyakan ke DPR," kata Jokowi singkat usai meninjau pasar sentral di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (14/5/2024).

Diketahui, RUU MK ini sebelumnya ditolak di era Menko Polhukam Mahfud Md, saat mewakili Pemerintah di DPR. Hal itu juga sempat pula disampaikan Mahfud saat menghadiri Halal Bihalal sekaligus pembubaran resmi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta, pada Senin, (6/4/2024).

"Banyak itu yang saya blok, tapi yang terakhir itu UU MK, tidak ada di Prolegnas, tidak ada di apa, masuk, dibahas," ujar Mahfud.

Mahfud menyebut, RUU MK ditolak ketika dirinya mewakili Pemerintah sebagai Menko Polhukam periode 2019-2023. Terlebih, kata Mahfud, pembahasan terhadap RUU MK itu dilakukan secara tiba-tiba menjelang kontestasi politik Pemilu 2024.

"Itu saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi, mewakili pemerintah, saya bilang coret, dead lock, tidak ada perubahan UU menjelang begini," tutur mantan calon wakil presiden nomor urut 03 itu. (wid,rls,ist,tmp/dya)

ADA 4 POIN KRUSIAL DALAM RUU MK

1. Aturan pemberhentian hakim

- Perubahan keempat RUU MK menghapus poin d pada Pasal 23 terkait aturan pemberhentian hakim. Poin itu semula menyebutkan hakim MK bisa diberhentikan salah satunya karena habis masa jabatan. Namun, dalam RUU terbaru, sebab pemberhentian karena habis masa jabatan dihapus. Sebagai gantinya, DPR dan pemerintah menyepakati menambah Pasal 23A terkait evaluasi hakim.

- Pada poin lain, pemerintah dan DPR mengubah aturan pemberhentian karena terlibat kasus pidana. Dalam naskah awal, hakim MK diberhentikan salah satunya karena dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun. Sementara, dalam naskah terbaru hakim MK bisa langsung diberhentikan jika telah dijatuhi pidana, tanpa mencantumkan syarat ancaman hukuman penjaranya.

2. Evaluasi hakim MK

Pemerintah dan DPR menyisipkan pasal tambahan, yakni Pasal 23A yang mengatur soal evaluasi hakim mahkamah. Pasal itu menyebutkan hakim mahkamah maksimal hanya bisa menjabat selama 10 tahun dan dievaluasi setiap lima tahun. Dalam setiap lima tahun, hakim mahkamah wajib dikembalikan ke lembaga pengusul yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

3. MKMK dari unsur DPR dan Presiden

Perubahan keempat RUU MK juga menambahkan perwakilan baru untuk anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Pada UU MK perubahan ketiga, MKMK berjumlah lima orang yang terdiri dari satu orang hakim MK, satu anggota praktisi hukum, dua anggota yang terdiri salah satu atau keduanya merupakan pakar hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.

Sementara dalam naskah RUU MK perubahan keempat, DPR dan pemerintah menyepakati untuk mengubah unsur perwakilan anggota MKMK.

Meski masih berjumlah lima orang, anggota MKMK nanti akan terdiri dari satu hakim MK, satu anggota usulan MK, satu anggota usulan MA, satu anggota usulan DPR, dan satu anggota usulan Presiden.

Anggota MKMK dari tiap unsur perwakilan seperti MA, DPR dan Presiden, harus berasal dari tokoh masyarakat dan akademisi. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 27A terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim MK.

4. Masa jabatan hakim MK yang tengah menjabat

Poin terakhir perubahan keempat RUU MK yakni pada Pasal 87 mengatur soal masa jabatan hakim MK yang saat ini tengah menjabat. Hal itu berkaitan dengan aturan maksimal masa jabatan hakim 10 tahun.

Pasal itu menyebutkan hakim konstitusi yang telah menjabat selama lima tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK, dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul.

Sementara, hakim MK yang telah menjabat lebih dari 10 tahun, akan berakhir masa jabatannya setelah berusia 70 tahun atau batas usia pensiun, jika mendapat persetujuan dari lembaga pengusul yang berwenang.

Masalah Menumpuk, Izin Usaha Paytren Yusuf Mansur Dicabut

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha (CIU) PT Paytren Aset Manajemen (PAM) yang dibangun Yusuf Mansur sebagai manajer investasi syariah setelah deretan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

OJK menetapkan sanksi administratif pencabutan izin usaha pada 8 Mei 2024. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran signifikan yang meliputi berbagai aspek operasional dan kepatuhan perusahaan.

PAM terbukti tidak memiliki kantor yang dapat ditemukan dan tidak memiliki pegawai yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai manajer investasi. Selain itu, perusahaan gagal memenuhi perintah tindakan tertentu dari OJK, menambah daftar panjang pelanggaran yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, perusahaan ini juga tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, yang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi. Ketidakhadiran Komisaris Independen semakin memperburuk pelanggaran tersebut.

PAM juga gagal memenuhi persyaratan fungsi-fungsi operasional yang seharusnya dijalankan oleh manajer investasi, seperti yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Selain itu, PT Paytren Aset Manajemen tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan, indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan menjaga keberlangsungan operasional.

Perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022, yang menunjukkan adanya kelalaian serius dalam aspek pelaporan dan transparansi.

"Dengan dicabutnya izin usaha ini, PT Paytren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi OJK, dilihat Selasa (14/5/2024).

Sebagai konsekuensi dari pencabutan izin ini, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada, serta menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK jika ada.

Selain itu, PT Paytren Aset Manajemen harus melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan. Perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan



PT Paytren Aset Manajemen (PAM) besutan Ustad Yusuf Mansur resmi ditutup OJK. (ilustrasi dok)

logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan.

Sebelumnya, Paytren dikenal masyarakat karena Yusuf Mansur kerap muncul sebagai pemiliknya. Namun, pada 2022, Yusuf mengumumkan akan menjual kepemilikan saham di PAM.

Diberitakan sebelumnya, Paytren merupakan manajer investasi dengan izin usaha bernomor KEP-49/D.04/2017 Tgl 24 Okt 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi Syariah kepada PT PayTren Aset Manajemen.

Adapun produk yang dipasarkan adalah reksa dana syariah. PAM menempatkan modal dasar Rp 25 miliar dengan modal disetor Rp 17,653 miliar.

Sejak resmi mendapatkan izin sebagai perusahaan pengelola investasi syariah, PAM merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia sebagai implementasi dari rencana OJK memperluas pasar modal syariah Indonesia dengan menerbitkan POJK mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi Nomor 61/POJK.04/2016 tertanggal 20 Desember 2016.

Adapun berdasarkan laman resmi PayTren saat itu, susunan direksi dipimpin oleh Yusuf Mansur, Ayu Widuri sebagai Direktur Utama, dan Achfas Achsien Direktur. Sementara itu, dewan pengawas syariah PAM antara lain, diketuai oleh Jaih Mubarak dan anggota Agus Haryadi.

Klaim Tak Ada Utang ke Nasabah

Yusuf Mansur masih tercatat sebagai pemegang saham pengendali

sebanyak 94 persen. Sementara 6 persen dimiliki Deddi Nordiawan.

Yusuf juga masih tercatat sebagai komisaris utama perusahaan. Dia mengaku ikhlas atas keputusan dari OJK dan menyampaikan harapan dan doa.

"Tidak apa-apa. Semoga jadi ibadah dan amal saleh, dan jadi jariah. Gimana niat, kan niat udah dicatat Allah. Pengen memajukan ekonomi ummat, ekonomi syariah," kata Yusuf Mansur.

Pihaknya juga memastikan, tidak ada dana nasabah yang menjadi utang perusahaan

"Dan yang tidak kalah penting, tidak ada uang orang juga yang masih terutang sebagai uang investasi masyarakat. Tidak ada. Bisa ditanyakan ke OJK," katanya.

Yusuf juga mengapresiasi OJK atas dukungannya selama ini terhadap PT PayTren Aset Manajemen (PAM).

"Dan makasih kepada OJK, yang selama ini udah membantu, memberi kesempatan, ngajarin saya, dan lain-lain, kebaikan. Semoga tidak kapok juga dengan ide-ide dan gerakan lain. Siap belajar juga terus. Untuk eksekusi yang lebih baik di ke depan harinya," kata Yusuf Mansur.

Yusuf juga mengatakan, dirinya sudah berusaha untuk menyelamatkan PayTren AM dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya, Yusuf menjual 100 persen sahamnya kepada investor baru. Dengan penjualan ini, pemegang saham pengendali PayTren akan berubah total.

Hal itu bertujuan mendapatkan strategic partner untuk pengembangan PayTren AM sebagai Manajer Investasi Syariah pertama di Indonesia.

"Perjuangan menjual itu, 3 tahun lebih, dan menghabiskan juga

berbagai energi. Ngga selamat juga dan semoga Allah ngampuni saya, dkk semua. Terus memberikan kesempatan lagi di kemudian hari, dalam keadaan lebih baik," tambah dia.

Ia juga menyatakan rasa terima kasih juga kepada masyarakat dalam perjuangan PayTren AM pada 2012-2018, hingga kemudian sampai pada 13 Mei 2024 ini. "Masyaallah. Teramat indah dan berharga. Terima kasih banyak," sambungnya. (wid,rls,ist/dya)

8 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PAYTREN

- (1) kantor tidak ditemukan;
- (2) Tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
- (3) Tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu;
- (4) Tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris.
- (5) Tidak memiliki Komisaris Independen;
- (6) Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
- (7) Tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan;
- (8) Tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah tersebut, maka PT Paytren Aset Manajemen:

1. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah
2. Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi (jika ada)
3. Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada)
4. Diwajibkan untuk melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
5. Dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas.



Sepinya Jalur Calon Perseorangan di Pilkada 2024

JAKARTA - Tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon yang ingin maju jalur perseorangan di Pilkada serentak 2024, telah berakhir pada Minggu (12/5/2024).

Berdasarkan update data yang diterima dari KPU RI, untuk pemilihan gubernur, ada 11 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mengajukan dan mengaktivasi akun sistem informasi pencalonan (SILON).

Dari 11 bapaslon, hanya dua bapaslon yang menyerahkan dokumen dukungan dan memenuhi syarat dukungannya.

Sementara, Bacagub yang memenuhi syarat jumlah dan sebaran dukungan itu adalah pasangan Muda Mahendara dan Suyanto Tanjung di Pilgub Kalimantan Barat (Kalbar) dan pasangan dari DKI Jakarta yakni Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.

Sementara itu, untuk pemilihan bupati, ada 213 bapaslon perseorangan yang telah memiliki akun SILON. Dari 213 itu, ada 109 bapaslon perseorangan yang menyerahkan dukungan, namun hanya ada 80 bapaslon yang diterima karena memenuhi syarat dan sebaran dukungan.

Kemudian untuk pemilihan wali kota, dari 52 bapaslon perseorangan yang memiliki akun SILON dan mengaktifkannya, hanya ada 27 bapaslon yang menyerahkan dukungan.

Dari 27 yang menyerahkan dukungannya, ada 21 bapaslon perseorangan yang dukungannya diterima.

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan syarat berat bisa jadi penyebab sepinya peminat calon independen.

Ketentuan syarat diatur dalam Pasal 41 UU 10 tahun 2016. Di pasal itu, dijelaskan perhitungan syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi bakal calon. Perhitungan didasarkan pada jumlah DPT di wilayah tersebut.

Dalam pasal tersebut disebutkan untuk provinsi dengan jumlah DPT sampai dengan 2 juta, harus didukung paling sedikit 10 persen). Sementara provinsi dengan DPT 2 juta hingga 6 juta orang, harus didukung minimal 8,5 persen.

Lalu provinsi dengan DPT 6 juta hingga 12 juta, kandidat harus didukung paling sedikit 7,5 persen). Sementara provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta harus didukung paling sedikit 6,5 persen).

Di DKI Jakarta misalnya di mana ada 8,25 juta DPT, bapaslon harus mendapat minimal 618.968 dukungan warga. Tersebar minimal di 4



Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk maju jalur perseorangan di Pilkada DKI 2024, Minggu (12/5/2024) malam. (Dok)

kabupaten/kota.

Neni mengatakan dari Pilkada ke Pilkada, ada revisi aturan di PKPU yang semakin membuat berat bapaslon, karena tidak hanya mengumpulkan KTP, bapaslon juga harus melampirkan formulir penyerahan dukungan.

"Belum lagi dengan jumlah sebaran dan dukungan. Kandidat yang tidak memiliki modal sosial dan kapital yang kuat, tidak didukung dengan tim yang solid akan kesulitan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Belum lagi verifikasi dengan metode sensus," kata Neni Selasa (14/5/2024).

Ditambah lagi, kata dia, saat ini masih ada euforia pemilu yang belum selesai. Di sisi lain, sengketa Pileg masih berproses di MK, sehingga konsentrasi pihak yang memiliki niat maju di perseorangan jadi terpecah.

"Saya memprediksi calon perseorangan di Pilkada 2024 akan cenderung mengalami penurunan dibanding dengan Pemilu 2020 lalu. Padahal kehadiran calon perseorangan ini menjadi alternatif bagi publik terutama mencegah calon tunggal," katanya.

Ia mengatakan berdasar pemantauan lembaganya, beberapa kandidat yang awalnya memiliki niat maju di perseorangan mengakui berat maju jalur itu.

Neni menyebut jika pun ada calon yang maju dan menang, nantinya relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif akan timpang.

"Relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif juga akan timpang ketika calon perseorangan menang karena tidak memiliki kekuatan seperti parpol yang jelas punya mesin hingga grass root," katanya.

Ia menjelaskan para kandidat yang diwawancara oleh DEEP juga menyampaikan lebih baik daftar melalui jalur parpol atau gabungan parpol ketimbang jalur perseorangan.

"Jadi pada akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan tiket dari

partai politik. Sehingga penurunan untuk kandidat dari calon perseorangan sudah bisa diprediksi," ujarnya.

Ada 6 Calon Independen se-Jatim

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Timur menyampaikan sebanyak enam pasangan bakal calon dari jalur perseorangan berkesempatan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 untuk sejumlah kabupaten/kota.

Komisioner KPU Jatim Choirul Umam merinci masing-masing satu pasangan bakal calon perseorangan pendaftarannya telah diterima sehingga berpeluang mengikuti Pilkada 2024 di Kabupaten Trenggalek, Jember, Bojonegoro dan Kota Probolinggo.

"Selain itu dua pasangan bakal calon perseorangan pendaftarannya telah diterima sehingga berpeluang mengikuti Pilkada 2024 di Kota Malang," katanya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (14/5/2024).

Umam menjelaskan sejak pendaftarannya dibuka 8 Mei hingga 12 Mei 2024, KPU di seluruh kabupaten/kota se-Jatim juga telah mengembalikan berkas pendaftaran yang diajukan oleh empat pasangan bakal calon perseorangan karena tidak memenuhi syarat dukungan.

"Yaitu masing-masing satu pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftar melalui KPU Kabupaten Bondowoso dan Kota Kediri. Serta dua pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftar di KPU Kota Surabaya," ujarnya.

Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Jatim itu memastikan berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh empat pasangan bakal calon perseorangan yang berujung gagal mendaftar tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

"Juga bukan disebabkan oleh

waktu pendaftaran yang dirasa terlalu pendek. Itu kalau waktu pengumuman sampai penyerahan berkas dukungan diberi waktu sampai dua bulan sekalipun belum tentu cukup bagi mereka untuk mengumpulkan," ucapnya.

Mantan Ketua KPU Kota Blitar itu mengungkapkan sejak regulasi membolehkan calon perseorangan mengikuti kontestasi Pilkada, mestinya sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari.

"Apalagi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 sudah muncul sejak jauh hari. Sehingga harusnya mereka sudah siap. Mengang tidak bisa segala persyaratannya dipersiapkan secara instan," tuturnya.

Sedangkan, terkait Pilkada Provinsi Jatim 2024, dipastikan tidak ada pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftar.

Sementara itu, terhadap enam pasangan bakal calon perseorangan yang pendaftarannya telah diterima, tidak serta merta bisa langsung mengikuti kontestasi Pilkada di kabupaten/kotanya masing-masing.

Karena, lanjut dia, masih harus melalui tahapan verifikasi administrasi terkait kebenaran dokumen yang diserahkan, yang digelar KPU kabupaten/kota setempat pada 13-29 Mei 2024.

"Jika lolos pun masih ada tahapan verifikasi faktual untuk mencocokkan formulir dukungan diberikan betul-betul diperoleh dari yang bersangkutan," kata Umam. (wid,ant, ist/dya)

PILKADA JALUR PERSEORANGAN SE-INDONESIA

Pemilihan Gubernur

Ada 11 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mengajukan dan mengaktivasi akun sistem informasi pencalonan (SILON). Hanya DUA bapaslon yang menyerahkan dokumen dukungan dan memenuhi syarat dukungannya. Yaitu pasangan Muda Mahendara dan Suyanto Tanjung di Pilgub Kalimantan Barat (Kalbar) dan pasangan dari DKI Jakarta yakni Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.

Pemilihan Bupati

Ada 213 bapaslon perseorangan yang telah memiliki akun SILON. Dari 213 itu, ada 109 bapaslon perseorangan yang menyerahkan dukungan, namun hanya ada 80 bapaslon yang diterima karena memenuhi syarat dan sebaran dukungan.

Pemilihan Wali Kota

Dari 52 bapaslon perseorangan yang memiliki akun SILON dan mengaktifkannya, hanya ada 27 bapaslon yang menyerahkan dukungan. Dari semua yang menyerahkan dukungannya, ada 21 bapaslon perseorangan yang dukungannya diterima.

Soal Lambannya Proyek IPA Sungai Bango Pj Wali Kota Malang Berjanji Segera Tuntaskan Amdal

MALANG - Kelanjutan pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Bango, Kecamatan Blimbing, menjadi salah satu hal yang disoroti oleh DPRD Kota Malang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk melakukan percepatan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurutnya, perluasan lahan yang sebelumnya direncanakan oleh pihak PJT I, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pemenuhan persyaratan amdal.

Wahyu juga menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan proyek ini mangkrak. "Yang pasti kami tidak pernah membiarkan begitu saja proyek WTP ini. Progresnya terus berjalan. Kami beberapa waktu lalu juga mengadakan rapat, dan tiap OPD saya perintah untuk segera dikoordinasikan. Saya minta lebih cepat lebih baik," tegasnya. Selasa (14/5/2024).

Sebagai informasi, proyek IPA Sungai Bango diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan air baku masyarakat Kota Malang, bahkan hingga 200 liter per second (lps) di

akhir Desember 2023 kemarin. Namun, dalam perjalanannya, proyek yang berada di Kelurahan Pandanwangi ini justru menghadapi masalah akibat belum mengantongi perizinan amdal yang akan sangat berdampak pada lingkungan masyarakat sekitarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Komisi A dan Komisi B untuk segera mengawal penyelesaian permasalahan proyek IPA Sungai Bango. Termasuk termasuk masalah perizinan dan administrasi yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Yang kami harapkan, kalau memang WTP ini tidak ada masalah, ya segera dilaksanakan. Karena memang (kemandirian air baku) ini dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi, kalau memang dalam pelaksanaannya butuh persiapan yang lebih matang lagi, ya lebih baik (proyek) dihentikan terlebih dahulu," ujar Made, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (14/5/2024).

Made menambahkan, pentingnya penyelesaian seluruh proses perizinan, administrasi, dan aspek lainnya dalam proyek yang telah



Proyek Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) di Sungai Bango Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

dimulai sejak Juni 2023 lalu tersebut. Menurutnya, Pemkot Malang perlu melakukan penyelesaian yang tepat pada tahap-tahap awal proyek, mengingat kelalaian dalam perencanaan dan perizinan dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.

Lebih lanjut, Made juga menyoroti perlakuan terhadap aset Pemkot Malang yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan

Umum Jasa Tirta (PJT) dan Perumda Air Minum Tugu Tirta.

"Artinya, kalau memang aset itu sewa, ya harus disewa. Itu saja sebenarnya. Karena ini kan memang aset Pemkot yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kita harapkan Badan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Pemkot Malang bisa hadir dalam pemecahan masalah ini," tukasnya. (Santi/Dya)

Jenguk Korban Kecelakaan Fortuner di Area Bromo Bupati Malang Sebut Bakal Evaluasi Jalur Poncokusumo

MALANG - Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memberikan bantuan kepada para korban kecelakaan maut di Poncokusumo. Sanusi juga berencana akan mengevaluasi jalur di tempat kejadian perkara (TKP), yang berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut.

Pernyataannya ini disampaikan usai Bupati Sanusi menjenguk para korban selamat yang dirawat di RST dr. Soepraoen, Kecamatan Sukun Kota Malang, Selasa (14/5/2024).

Dalam kunjungannya, Sanusi menegaskan bahwa seluruh korban telah mendapatkan penanganan dari dokter dan juga perhatian penuh dari Pemkab Malang. "Menurut keterangan dokter, kondisi korban secara umum normal meskipun ada yang perlu tindakan ortopedi dan operasi untuk tulang yang patah," ujar Sanusi.

Sanusi juga menjelaskan, bantuan akan diberikan berdasarkan status keanggotaan BPJS korban. Pihaknya akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Sosial. Jika korban memiliki BPJS, sambungnya, maka akan dibiayai BPJS. Namun, jika tidak,



Bupati Sanusi, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Anis Zaidah Sanusi, saat mengunjungi korban selamat dari kecelakaan di Poncokusumo, RST Soepraoen Kota Malang, Selasa (14/5/2024). (Santi/Lenteratoday)

Pemkab Malang akan menanggung pembiayaan korban.

"Khusus untuk korban yang yatim piatu dan tidak memiliki BPJS, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemkab Malang melalui Dinas

Kesehatan," tegas Sanusi.

Dalam kesempatannya ini, Bupati Sanusi juga menyayangkan mengenai kondisi jalur di TKP yang rawan kecelakaan, mengingat ini merupakan kejadian kedua di lokasi yang sama.

"Jalan di TKP adalah jalan nasional, jadi kami akan koordinasikan dengan Kementerian PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Usulan kami adalah pemasangan rambu-rambu dan penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan," jelasnya.

Sanusi mengungkapkan, survei akan segera dilakukan untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Salah satu langkah yang akan diambil yakni pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di lokasi TKP, yang selama ini terkenal dengan kondisi jalan yang cukup gelap.

"Mungkin besok atau lusa, saya akan survei ke sana bersama Dishub, Kepolisian, dan PU Bina Marga untuk menentukan apa yang perlu dilakukan," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, dalam kejadian nahas tersebut, mobil minibus Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 1683 TJG, terjun ke jurang di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada Senin (13/5/2024) sekitar pukul 18.00 WIB. (Sabti/Dya)

Mengenal Aktris

JAMI GERTZ

dengan Kekayaan Rp46 Triliun

BELUM lama ini, Celebrity Net Worth mengeluarkan daftar aktor dan aktris terkaya di dunia, dengan posisi nomor satu ditempati oleh Tom Cruise dengan kekayaan US\$600 juta.

Tapi ternyata, ada aktris yang lebih kaya darinya. Namanya memang tak setenar Tom Cruise, George Clooney, Julia Roberts atau Angelina Jolie karena memang dirinya sudah lama tidak aktif di dunia akting dan memiliki kehidupan yang sangat privat.

Aktris itu adalah pemeran di film "The Lost Boys", Jami Gertz, yang memiliki kekayaan bersih sebesar US\$3 miliar atau setara dengan Rp46,25 triliun pada 2023.

Nama Gertz masih sering masuk dalam kredit beberapa film termasuk "Twister", "Seinfeld", "Modern Family" dan "This is Us".

Dia juga sempat mendapat peran kecil pada 2022 di "I Want You Back", tapi dia sangat jarang terlihat di mata publik selama bertahun-tahun, dan ternyata, membangun kekayaannya yang sangat besar.

Sumber kekayaannya berasal dari kepemilikan sebagian tim NBA, Atlanta Hawks, dan pemilik minoritas Milwaukee Beavers setelah menikah dengan suaminya, seorang investor miliarder, Tony Ressler. Investasi mereka benar-benar membuahkan hasil.

Tony Ressler adalah salah satu pendiri Apollo Global Management dan Ares Management, yang masing-masing memiliki aset yang dikelola senilai US\$500 miliar dan US\$300 miliar.

Pasangan itu dan membeli rumah pertama mereka di LA. Saat mereka menikah pada 1989, bos Tony, Drexel Burnham Lambert, berada di tengah keruntuhan finansial paling dahsyat dalam sejarah Wall Street.

Setahun setelah mereka menikah, Tony mendirikan Apollo Global bersama tiga mantan rekan kerja dari Drexel.

Dia meninggalkan Apollo pada 1997 untuk ikut mendirikan perusahaan manajemen aset bernama Ares Management.

Saat ini, Apollo memiliki lebih dari US\$500 miliar aset yang dikelola, dan Ares memiliki lebih dari US\$300 miliar. Ressler diperkirakan memiliki 30% ekuitas di Ares.

Pasangan ini pertama kali muncul dalam daftar miliarder kami pada 2015 dengan kekayaan bersih US\$1 miliar. Pada 2017, kekayaan bersih mereka adalah US\$1,8 miliar.

Saat ini, kekayaan gabungan Jami Gertz dan Tony Ressler mencapai US\$8 miliar atau sekitar Rp128,16 triliun. Tak hanya kaya raya, pasangan ini juga sering melakukan donasi.

Pada 2012, Giving Back Fund menobatkan Gertz dan suaminya sebagai donatur nomor satu untuk amal setelah mencatat rekor donasi sebesar US\$10 juta ke Ressler-Gertz Foundation.

Profil

Jami yang lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 28 Oktober 1965 itu kini juga tercatat sebagai pemilik tim bola basket NBA. Kepemilikan saham tim itu dia dapatkan setelah menikah dengan miliarder asal Los Angeles, Tony Ressler.

Aktris yang mulai dikenal publik setelah peran awalnya dalam film Crossroads itu saban bulannya mengantongi pendapatan US\$ 20 juta atau sekitar Rp 290,2 juta.

Bahkan, seperti dilansir L'Officiel USA, secara kumulatif mencapai US\$ 250 juta atau sekitar Rp 3,74 triliun per tahun.

Lazimnya aktris sekaligus wanita miliarder, Jami dikenal juga gemar mengoleksi barang-barang mahal. Termasuk mobil.

Namun, dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ABC beberapa waktu lalu, Jami enggan menyebut nama dan jenis mobil mewah yang dikoleksinya. Dia hanya mengaku suka mobil-mobil buatan Mercedes-Benz (Mercy), Porsche, Audi, dan Ferrari (Bisnis)



AIR HANGAT

"INFUSED

WATER"

TINGKATKAN

KESEHATAN

USUS



MENGHIDRASI tubuh di musim panas atau saat memulai hari dengan infused water, dapat meningkatkan pencernaan, detoksifikasi usus dari makanan yang tidak tercerna, logam berat dan racun.

Ghee dengan air hangat dalam salah satu kombinasi yang dapat meningkatkan kesehatan usus Anda selain meningkatkan fungsi kognitif dan membantu penurunan berat badan, menurut laman Hindustan Times.

Dr Dimple Jangda, Pelatih Ayurvedic dan spesialis usus mengatakan orang dengan kulit kering kasar, rambut kering kasar dan keriting, usus kering yang berujung pada sembelit, pembuangan limbah yang tidak tuntas, dan gangguan kesehatan pencernaan merupakan tanda kurang hidrasi.

Ia menyarankan orang yang mengalami gejala tersebut dapat mengonsumsi 200 mililiter air hangat dengan 1 sendok teh ghee (mentega murni) saat perut kosong.

Ghee memiliki asam butirat yang

membantu melumasi saluran pencernaan, menstimulasi sistem pencernaan, membantu meningkatkan produksi enzim pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan.

Hal ini memungkinkan kelancaran evakuasi limbah dan membantu menghilangkan logam berat dari tubuh kita.

Ghee juga kaya akan vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak esensial yang membantu menyehatkan dan mendukung jaringan seperti kulit, persendian, dan otot.

Selain itu, Ghee memiliki efek mengikis pada usus, dan membantu menghilangkan logam berat, ama (racun) dari tubuh kita. Ketika dilarutkan dalam air hangat, ia bergerak ke sistem pencernaan dengan cepat.

Manfaat lainnya adalah mendukung kejernihan mental, kekebalan dan membantu penurunan berat badan.

Alternatifnya, bagi mereka yang memiliki metabolisme rendah dan

cenderung mengalami kenaikan berat badan, bisa memulai hari dengan infus lemon, jahe, kayu manis.

Bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan lesu, metabolisme rendah dan kecenderungan menambah berat badan, dapat memulai hari dengan 200 mililiter air hangat dengan perasan lemon, sejumput kayu manis dan parutan jahe.

"Ini membantu menghidrasi sistem, mendorong eliminasi racun, dan membantu proses detoksifikasi. Lemon juga membuat tubuh menjadi alkali, meningkatkan pembakaran lemak dan menurunkan berat badan. Lemon juga membantu membunuh bakteri tidak sehat di mulut dan mencegah bau mulut," tambah Jangda.

Sementara Ahli Gizi Bhakti Arora Kapoor dalam laporan terbarunya mengatakan, hidrasi menjadi bahkan lebih penting lagi di musim panas karena kita berkeringat lebih banyak, yang menyebabkan potensi dehidrasi dan hilangnya elektrolit penting. Infused water menawarkan solusi yang lezat, memberikan hidrasi sekaligus menggoda selera Anda

dengan rasa yang menyegarkan.

"Musim panas menghadirkan kegembiraan dan tantangan tersendiri, dan tetap terhidrasi adalah hal yang terpenting selama bulan-bulan hangat ini. Meskipun tergoda untuk mengonsumsi minuman bersoda manis atau minuman berkafein, air menjadi hidrator utama, terutama ketika diresapi dengan rasa alami," katanya.

Memasukkan buah-buahan, sayuran, dan herba ke dalam infus air Anda menambah tambahan nutrisi, memasok vitamin, mineral, dan antioksidan penting yang mendukung fungsi kekebalan dan melawan peradangan.

Air lemon umumnya aman untuk diminum, tetapi ada beberapa efek samping potensial yang perlu diperhatikan.

Lemon mengandung asam sitrat yang dapat mengikis enamel gigi. Untuk membatasi risikonya, minumlah air lemon melalui sedotan, dan bilas mulut dengan air putih sesudahnya. (Antara)

Musim panas menghadirkan kegembiraan dan tantangan tersendiri, dan tetap terhidrasi adalah hal yang terpenting selama bulan-bulan hangat ini. Meskipun tergoda untuk mengonsumsi minuman bersoda manis atau minuman berkafein, air menjadi hidrator utama, terutama ketika diresapi dengan rasa alami,"

ARORA KAPOOR



POCO F6 SERIES

DIRILIS 23 MEI 2024



PONSEL pintar, POCO, mengonfirmasi bakal merilis ponsel pintar terbaru dari seri F mereka secara global yakni POCO F6 series pada 23 Mei 2024.

Perilisan dua ponsel yang terdiri atas POCO F6 dan POCO F6 Pro itu akan berlangsung di Dubai pada pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 18.00 WIB pada Kamis (23/5).

Perilisan ponsel pintar itu bakal disiarkan secara langsung lewat berbagai kanal media sosial yang dimiliki POCO dan akan diumumkan mendekati hari perilisan.

Hal itu terkonfirmasi dari unggahan X @POCOglobal yang mencuit, "Bersiap untuk menyaksikan POCO F6 series terbaru".

Acara tersebut mengusung tema bertajuk "HyperPower Evolved" yang tampaknya menguatkan kesan bahwa suksesor POCO F5 series itu bakal memiliki performa yang lebih canggih lagi dari pendahulunya.

Dalam laporan GSM Arena, Senin, Poco F6 Pro diproyeksikan merupakan Redmi K70 yang sudah dirilis di China namun diganti namanya untuk versi global.

Jika benar maka ponsel ini akan didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dan akan memiliki baterai 5.000 mAh.

Di sisi lain, Poco F6 akan debut dengan Snapdragon 8s Gen 3, yang tentunya membuat perbandingan kinerja yang menarik antara keduanya.

Poco F6 juga dikabarkan akan mendapatkan kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera selfie 20MP dengan sensor OmniVision OV20B.

Sementara F6 Pro juga mendapatkan kamera utama 50 MP juga, bersama dengan dukungan pengisian daya cepat super besar 120W.

Seri lain

Sebelumnya POCO meluncurkan smartphone barunya melengkapi lini X6 series yaitu POCO X6 Neo. Ponsel ini hadir dalam warna unik yang sebelumnya juga terlihat pada ponsel Redmi Note 13R Pro.

Saat ini POCO X6 Neo hanya tersedia di pasar India dan belum diketahui apakah akan dirilis ke pasar global. Laporan GSM Arena, Rabu, menyebutkan meski warnanya sama, spesifikasi dari POCO X6 Neo dan Redmi Note 13R Pro jelas berbeda.

POCO X6 Neo justru lebih cocok disebut mirip dengan Redmi Note 13 versi China dari spesifikasinya.

Ponsel ini hadir dengan chipset besutan MediaTek yaitu Dimensity 6080 yang telah terhubung konektivitas 5G.

Untuk memorinya, ponsel ini ditawarkan dalam dua konfigurasi yaitu RAM 8GB dan memori penyimpanan 128 GB serta RAM 12 GB dan memori penyimpanan 256 GB.

Sama seperti spekulasi spesifikasi yang beredar, ponsel ini hadir dengan layar 6,67 inci dengan panel layar OLED beresolusi Full HD+ dan memiliki kecepatan refresh hingga 120 Hz. Ponsel baru ini hadir dengan Android 13, meskipun faktanya versi Poco X6 Pro sudah hadir dengan Android 14 dan HyperOS di atasnya.

Membahas daya, POCO X6 Neo hadir dengan baterai 5.000 mAh mendukung pengisian daya 33W. Pada spesifikasi audio, ponsel ini hanya dilengkapi satu speaker di bagian bawah. Ponsel ini ditawarkan dalam tiga pilihan warna yaitu Astral Black, Horizon Blue, dan Martian Orange.

Adapun harganya untuk varian RAM 8GB dan ROM 128 GB 15.999 Rupee (Rp3 juta) dan RAM 12GB serta ROM 256 GB dibanderol 17.999 Rupee (Rp3,3 juta) (Antara)





TANDA KOLESTEROL TINGGI DI WAJAH DAN MATA

KOLESTEROL tinggi biasanya tidak menunjukkan gejala apa pun, namun pada kasus tertentu bisa muncul di wajah atau mata.

Mengawasi tanda-tanda tertentu pada tubuh dapat mengingatkan seseorang jauh sebelum benar-benar rentan terhadap masalah kolesterol tinggi dan akhirnya penyakit jantung.

Ditulis Hindustan Times, Sabtu (11/5), Konsultan Senior - Nutrisi & Diet Dr Neeti Sharma, menjelaskan beberapa tanda kolesterol tinggi bisa diamati salah satunya dari bercak kuning pada kelopak mata.

Bercak kekuningan pada kulit, terutama di sekitar kelopak mata,

disebut dengan xanthelasma. Mereka terbuat dari timbunan kolesterol dan sering kali menandakan kadar kolesterol darah tinggi.

Meskipun sebagian besar tidak berbahaya, keberadaannya dapat mengindikasikan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Jika Anda terkena xanthelasma, Anda harus menemui dokter.

Kedua, ada perubahan di sekitar tepi kornea berupa cincin berwarna putih atau abu-abu yang disebut arcus senilis. Hal ini disebabkan oleh timbunan kolesterol dan mungkin merupakan tanda peningkatan kolesterol, terutama pada mereka yang berusia di bawah 45 tahun.

Mirip dengan arcus senilis, Arcus kornea biasanya terlihat pada individu berusia di bawah 40 tahun, berupa cincin putih atau abu-abu yang mengelilingi kornea.

Bisa juga itu pertanda kadar

kolesterol tinggi.

Tanda kolesterol tinggi juga bisa dilihat dari adanya pigmentasi kulit menjadi kekuningan atau xanthoderma. Hal ini karena hiperlipidemia di mana darah mengandung lipid berlebih.

Biasanya muncul paling baik di wajah dan di area sekitar mata. Akumulasi timbunan kolesterol tinggi di dalam lapisan kulit menjadi penyebab perubahan warna ini. Meskipun tidak selalu ada, hal ini bisa menjadi tanda peningkatan kolesterol dan memerlukan pengujian tambahan.

Jerawat kecil juga bisa muncul akibat ada pertumbuhan jinak yang dikenal sebagai xanthomas karena kolesterol menumpuk di sel tertentu yang terletak di bawah permukaan kulit.

Penampilannya bisa berupa jerawat kecil kekuningan atau bercak besar, tergantung ukuran dan bentuknya. Jika muncul di wajah, sering kali muncul di pipi, kelopak mata, atau area sekitar mata.

Meskipun biasanya tidak terasa sakit, keberadaannya bisa menjadi tanda kondisi medis yang mendasari seperti kelainan metabolisme lipid atau peningkatan kolesterol.

Rasa lelah

Ditulis laman Well and Good, ahli mengatakan faktanya kolesterol hampir tidak selalu memiliki gejala dan salah satu penyebab merasa lelah saat memiliki kolesterol tinggi adalah

karena tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat.

Jika tidak ditangani, kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, suatu kondisi yang juga dapat menyebabkan kelelahan, ujanya. Tracy menambahkan kolesterol dapat mengembangkan plak di arteri, dan jantung akan mulai memberi tanda-tanda bahwa ia sedang kesulitan. Dan salah satu tandanya adalah kelelahan, serta penurunan toleransi olahraga.

Pada akhirnya, bukan kolesterol tinggi itu sendiri yang menyebabkan kelelahan, namun faktor gaya hidup yang menyebabkan kolesterol tinggi, dan penyakit yang diakibatkannya, yang dapat membuat seseorang merasa lesu dan lesu.

Selain kelelahan, gejala kolesterol tinggi yang telah berkembang menjadi penyakit jantung menurut Mayo Clinic antara lain nyeri dada, tekanan, atau sesak, pusing atau sakit kepala ringan, palpitasi jantung, sesak napas, nyeri di leher atau rahang, dan mati rasa atau kelemahan pada lengan dan kaki.

Perubahan gaya hidup adalah langkah awal untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi.

Direktur medis di Cardiology Consultants of Philadelphia di Pennsylvania, Brett Victor, MD, mengatakan usahakan untuk mengisi piring Anda dengan biji-bijian, buah-buahan dan sayuran, lemak sehat, dan protein tanpa lemak yang menyehatkan jantung seperti ikan (Antara)



Dakwaan Gratifikasi ... (dari Hal 1)

MANTAN Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Darmanto didakwa melakukan praktik gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (14/5/2024).

Terdakwa diduga menerima uang dari sejumlah pengusaha yang nilainya Rp23,5 miliar lebih selama menjabat. Luki Dwi Nugroho Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membacakan dakwaan dalam sidang perdana perkara gratifikasi Eko Darmanto.

"Terdakwa sebagai aparatur sipil negara (ASN) menerima gratifikasi berupa uang keseluruhan Rp23.511.303.640,24. Gratifikasi tersebut diterima dari beberapa pihak," kata Luki waktu membaca dakwaan.

Masih dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Eko didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha. Antara lain, dari Andri Wirjanto sebesar Rp1,37 miliar, Ong Andy Wiryanto Rp6,85 miliar, David Ganianto dan Teguh Tjokrowibowo sebesar Rp300 juta dan Lutfi Thamrin serta M Choiril sebesar Rp200 juta.

Kemudian dari Irwan Daniel Mussy Rp100 juta, Rendhie Okjiasmoko Rp30 juta, Martinus Suparman Rp930 juta, Soni Darma Rp450 juta, Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno sebesar Rp250 juta dan Benny Wijaya Rp60 juta.

Selanjutnya dari Steven Kurniawan sebesar Rp2,3 miliar, Lin Zhengwei dan Aldo Rp204,3 juta. Serta ada pengusaha yang tidak diketahui namanya memberi Rp10,9 miliar. Diketahui, sebagian locus delicti atau lokasi terjadinya kasus ini ada yang berlangsung di Kota Surabaya.

"Sekitar jumlah itu, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ucapnya.

Luki melanjutkan, perbuatan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta itu merupakan praktik tindak pidana korupsi.

JPU menjeratnya dengan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain dijerat dengan pasal-pasa itu, terdakwa juga dijerat oleh penyidik KPK dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," katanya.

Sesudah mendengar dakwaan dari JPU KPK, Gunadi Wibakso pengacara Eko Darmanto menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

"Kami tidak mengajukan eksepsi langsung dilanjutkan dengan pembuktian," tutur Gunadi.

Untuk diketahui, Nama Eko Darmanto mencuat ke publik dari cuitan akun Twitter @logikapolitikid yang menyebut pejabat eselon III bea cukai ini mempunyai koleksi mobil antik, motor gede Harley Davidson, dan beberapa barang branded. Kekayaan itu kerap dipertontonkan melalui akun media sosial.

Padaحال, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2021, Eko memiliki kekayaan senilai Rp15,7 miliar dikurangi utang berjumlah Rp9 miliar. Harta Eko senilai Rp 12,5 miliar berbentuk dua tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara.

Jokowi akan Turun Tangan soal Bea Cukai

Diketahui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, lembaga yang mengurus kepabeanan dan cukai negara itu memiliki sejumlah masalah dalam hal penindakan barang impor. Perilaku pejabat Bea Cukai yang diduga semena-mena dalam menerapkan denda menuai kecaman publik. Beberapa kasusnya sempat viral di media sosial Indonesia, seperti X dan TikTok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Sri Mulyani beberapa kali menggelar pertemuan dengan pimpinan Bea Cukai dan meminta supaya ada perbaikan pelayanan publik. Namun, berbagai persoalan terus terjadi dan sentimen negatif publik terhadap Bea Cukai terus meningkat.

Kini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun bersiap untuk turun tangan membereskan segudang masalah di Bea Cukai. Jokowi mengatakan dia beserta jajarannya akan menggelar rapat terbatas untuk membahas secara khusus institusi itu.

"Ya, nanti akan kami Ratas-kan (rapat terbatas) di rapat internal," kata Jokowi usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, (14/5/2024).

Meski begitu, Jokowi tidak menyebutkan tanggal pasti kapan rapat khusus tersebut akan digelar. Ia juga tidak menjelaskan langkah apa saja yang bakal dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di Bea Cukai. Ia hanya mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran Ditjen Bea Cukai terkait masalah yang ramai akhir-akhir ini.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai kemarin. Diskusi tersebut membahas tindak lanjut masukan dari masyarakat, khususnya terkait kasus beberapa minggu belakangan.

"Kami membahas tindak lanjut masukan serta perbaikan fundamental di institusi Bea Cukai RI," ujar Sri Mulyani di laman resmi instagramnya. Bendahara negara itu juga berterima kasih untuk semua masukan dan dukungan kepada Bea Cukai untuk menjadi lebih baik.

Belakangan ini, institusi Bea Cukai memang tengah menjadi perbincangan di kalangan warganet media sosial Indonesia. Sejumlah netizen mengeluhkan besarnya beban bea masuk di Indonesia untuk barang-barang yang dibeli di luar negeri.

Keresahan itu salah satunya disampaikan oleh pengguna media sosial TikTok @radhikaalthaf. Dia mengeluhkan besarnya beban bea masuk di Indonesia untuk sepatu impor yang ia beli. Dia bercerita perihal pengenaan bea masuk sebesar Rp 31,8 juta untuk pembelian sepasang sepatu seharga Rp 10,3 juta.

Keluhan serupa pernah disampaikan oleh penyanyi Cakra Khan. Melalui media sosial X (Twitter), pelantun lagu "Kekasih Bayangan" itu mengungkapkan pernah merasakan dua kali pengalaman tidak menyenangkan saat berurusan dengan Bea Cukai. Salah satunya adalah ketika dia diminta membayar pajak sebesar Rp 21 juta untuk jaket yang dibeli seharga Rp 6 juta.

Cakra Khan pun menolak membayar pajak yang menurutnya tidak masuk akal itu. Dia juga mengaku sempat didesak kuasa hukum pihak ekspedisi untuk membayar denda bea masuk dengan nominal empat kali lipat dari harga asli itu.

Selain itu, Bea Cukai juga menjadi sorotan akibat menahan papan ketik braille hibah dari Korea Selatan untuk sekolah luar biasa (SLB) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sejak 2022. Kini, keyboard braille tersebut sudah dikembalikan.

Baru-baru ini ramai pula pembahasan soal peti jenazah yang juga kena pajak impor. Seorang pengguna media sosial X atau Twitter mengaku rekannya dipungut bea masuk sebesar 30 persen untuk peti jenazah karena dianggap barang mewah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encap Dudi Ginanjar, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut dipastikan tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia, tidak ada yang ditagih atau dipungut bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor.

Kinerja 'On the Track'

Di tengah gejolak perekonomian global dan sejumlah tantangan yang terjadi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), masih menjadi

instrumen penting perekonomian nasional. Kinerja APBN yang on the track sendiri, didukung dari perpajakan yang menyumbang sekitar 80% penerimaan negara, di antaranya penerimaan cukai dan kepabeanan. Banyak pihak mengapresiasi kinerja Bea Cukai dan mengingatkan krusialnya peran institusi ini terhadap perekonomian negara.

Direktur Eksekutif Center Of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut, peran Bea Cukai terhadap perekonomian negara memang krusial. "Fungsinya bukan cuma sebagai salah satu sumber penerimaan yang vital bagi negara bagi APBN, tapi di sisi lain dalam hal lalu lintas perdagangan kaitannya dengan aktifitas perdagangan. Di sinilah titik krusialnya Bea Cukai," ujarnya.

Untuk diketahui, selain penerimaan negara, fungsi Bea Cukai adalah sebagai community protector, melindungi masyarakat dari barang yang terlarang dan dibatasi impornya atau berfungsi menjadi trade facilitator dan industrial assistance. Bea dan Cukai juga mengemban fungsi penting dengan memfasilitasi industri dan perdagangan dalam negeri.

Pada triwulan I-2024, pendapatan negara terkumpul Rp620,01 triliun atau 22,1% dari target. Dari sisi kepabeanan dan cukai, pendapatan Bea Cukai hingga Maret 2024 mencapai Rp 69 triliun atau 21,5% dari target.

Faisal mengatakan, volume lalu lintas barang keluar dan masuk teritorial negara ini begitu besar dan melibatkan uang yang begitu besar.

"Oleh karena itu, governance atau tata kelola dalam Bea Cukai adalah hal yang penting. Jika tata kelolanya baik, maka dari sisi pemasukan atau penerimaan negara dan pengaturan dalam hal perdagangan ekspor impor kontrol terhadap barang juga jadi maksimal. Termasuk kontrol terhadap barang-barang yang ilegal," tuturnya.

Tapi sebaliknya, jika tidak, maka sisi aturan yang mengatur keluar masuk barang dari negara lain juga tidak efektif. "Itu mempengaruhi juga dan bisa kemana-mana efeknya kepada perekonomian dalam negeri, baik konsumen kepada produsen, industri manufaktur pun terimbas, nah disini titik kritis daripada peran penting Bea Cukai," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menyebut kinerja Bea Cukai dari sisi penerimaan negara setiap tahun selalu sejalan dengan target. Di 2021 pendapatan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269 triliun, tumbuh 26,23% year on year (yoy) atau sebesar 125,1% dari target.

Di tahun 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 317,8 triliun, tumbuh 18,0% atau mencapai sebesar 106,3% dari target. Sepanjang 2023, di tengah volatilitas harga komoditas akibat perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik, Bea Cukai juga mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp286,2 triliun atau sekitar 95,4% dari target. (wid,pra,ist,rls/dya)

WHO Peringatkan Ancaman Penularan MERS-CoV pada Jamaah Haji

KENALI GEJALA UMUMNYA

1. Sesak napas

Sesak napas adalah gejala yang umum terjadi pada infeksi MERS-CoV karena virus ini cenderung menyerang sistem pernapasan. Pada beberapa kasus, sesak napas bisa menjadi sangat parah, bahkan menyebabkan kegagalan pernapasan yang memerlukan perawatan medis darurat.

2. Demam

Demam merupakan respons alami tubuh terhadap infeksi, termasuk MERS-CoV. Suhu tubuh yang meningkat adalah upaya tubuh untuk melawan virus dengan meningkatkan suhu di dalam tubuh, sehingga membuat lingkungan yang tidak nyaman bagi virus.

3. Batuk dengan atau tanpa darah

Batuk adalah respons tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari kotoran atau lendir yang mungkin terkumpul akibat infeksi. Ketika terjadi infeksi paru-paru yang serius, seperti pada kasus MERS-CoV, batuk bisa menjadi produktif dan bahkan menghasilkan darah.

4. Sakit tenggorokan

Sakit tenggorokan juga termasuk gejala umum pada banyak jenis infeksi virus, termasuk MERS-CoV. Hal ini bisa disebabkan oleh peradangan atau iritasi pada saluran pernapasan akibat infeksi virus.

5. Nyeri pada otot dan perut

Nyeri pada otot dan perut sering kali terjadi sebagai respons tubuh terhadap infeksi. Reaksi ini bisa disebabkan oleh peradangan atau reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap virus.

6. Muntah

Muntah bisa terjadi pada beberapa pasien MERS-CoV sebagai respons terhadap infeksi virus atau akibat gangguan pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh infeksi.

7. Diare

Diare adalah gejala pencernaan yang umum pada banyak infeksi virus, termasuk MERS-CoV. Gejala itu bisa disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap infeksi atau oleh gangguan langsung pada sistem pencernaan.

8. Sakit kepala

Sakit kepala adalah gejala umum pada banyak kondisi kesehatan, termasuk infeksi virus seperti MERS-CoV. Hal ini bisa disebabkan oleh peradangan, peningkatan suhu tubuh, atau reaksi tubuh terhadap infeksi.



Jamaah haji Indonesia gelombang pertama tiba di Madinah, Arab Saudi, Selasa (14/05/2024). (MCH Kemenag)

JAKARTA— Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengimbau jamaah haji mewaspadaai penularan penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) di Arab Saudi.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi (KSA), telah ditemukan tiga kasus baru MERS-CoV sejak 10-17 April 2024 yang menyebabkan salah satunya meninggal dunia.

Hal ini pun langsung disikapi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. "Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimbau kepada jamaah agar selalu waspada terhadap berbagai penyakit, termasuk MERS-CoV dengan perilaku sehat dan menghindari sumber-sumber penularan," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Liliék Marhaendro Susilo dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

MERS-CoV merupakan virus zoonosis yang bisa ditularkan antara hewan dan manusia. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan yang terinfeksi.

Terdapat bukti unta di Timur Tengah adalah sumber utama virus ini. MERS-CoV juga dapat ditularkan dari orang ke orang melalui batuk. Namun, virus ini kemungkinan tidak terlalu menular antar manusia kecuali saat melakukan kontak dekat.

MERS-CoV telah diidentifikasi pada dromedaris di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Secara total, 27 negara telah

melaporkan kasus ini sejak 2012, menyebabkan 858 kematian yang diketahui akibat infeksi dan komplikasi terkait.

Gejala utama MERS-CoV terbelang mirip flu dan berkembang 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Gejalanya juga dapat berkisar dari ringan hingga berat.

Sebagai informasi, pasien dengan kasus yang lebih parah dapat mengalami pneumonia, di mana paru-paru menjadi meradang dan terisi cairan, menyebabkan kesulitan bernapas yang serius. Gagal napas, kerusakan ginjal, dan demam tinggi juga merupakan komplikasi serius yang bisa terjadi pada kasus MERS-CoV yang parah.

Sayangnya, tingkat kematian akibat MERS-CoV cukup tinggi, terutama pada pasien dengan kondisi medis yang sudah melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka sebelumnya.

Kondisi medis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit parah dan memiliki risiko kematian yang lebih tinggi akibat infeksi.

Diimbau Pakai Masker

Menyikapi informasi tersebut, Liliék mengatakan upaya yang dapat dilakukan calon haji adalah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan asupan makanan bergizi yang diolah dengan baik, bila perlu ditambah minum vitamin.

Selain itu, Liliék juga menyarankan memakai masker saat berada di tempat keramaian, menjaga ke-

bersihan diri, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer.

"Di luar waktu ibadah agar istirahat yang cukup, tidak mengunjungi tempat peternakan onta, serta menghindari kontak langsung dengan onta," katanya.

Liliék memastikan fasilitas layanan kesehatan Indonesia di Arab Saudi sudah siap untuk merawat pasien, manakala terjadi transmisi.

Kemenkes RI memfasilitasi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang berada di Daerah Kerja (Daker) Makkah dan Daker Madinah yang setingkat dengan pelayanan Rumah Sakit Tipe C di Indonesia, dengan dukungan 68 tenaga medis dari profesi dokter, dokter spesialis hingga apoteker.

KKHI Madinah berada di Distrik AL Aridh menyediakan pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), High Care Unit (HCU), dokter gigi dan dokter spesialis, laboratorium, farmasi, serta radiologi.

Selain itu, juga disediakan 10 unit mobil ambulans untuk melakukan mobilisasi dan evakuasi calon haji yang sakit. Operasional ambulans ditempatkan di Bandara Madinah dan di KKHI.

KKHI Madinah juga dilengkapi ruang rawat inap dengan daya tampung sebanyak 62 tempat tidur yang terdiri atas 10 tempat tidur di IGD, delapan tempat tidur di HCU, delapan tempat tidur di ruang psikiatri, dan 18 tempat tidur untuk rawat inap perempuan serta ruang rawat inap laki-laki. (wid,ant,ist/dya)

